

## Dialektika Pendidikan Di Indramayu (Antara Idealisme Dan Realisme)

Drs. Wahyudin, M.Ag

### Abstrak

Dinamika pendidikan di Indramayu dikaji dengan landasan filosofis. Dalam Islam dikenal tiga terminologi yang berkaitan dengan pendidikan; *Ta'lim*, *Tarbiyah* dan *Ta'dzib*. Secara teoritis, pendidikan merupakan kebutuhan manusia dan sarana mengolah akal, perasaan dan moralitas, harus mengacu pada nilai-nilai yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Program peningkatan IPM (Indek Pembangunan Manusia) Pemerintah Kabupaten Indramayu telah berhasil meningkatkan status pendidikan di Indramayu dengan menduduki rangking papan atas di tingkat Propinsi Jawa Barat. Realitasnya kebijakan Pemerintah Daerah dalam Wajar Dikdas, Tunjangan Daerah bagi guru, dan Pemenuhan Sarana Sekolah (Pembangunan ruang kelas baru) masih dalam tataran formalitas dengan kecenderungan politis, dan belum berdasarkan kerangka substantif-filosofis.

### Kata Kunci

Pendidikan, filosofis, Indramayu, tarbiyah, ta'lim, ta'dzib, wajib belajar, otonomi daerah

### A. Pendahuluan

Berangkat dari pemikiran filosofis, paling tidak kajian pendidikan dimulai dengan mempertanyakan makna substansial; apakah manusia membutuhkan pendidikan,? mengapa?, obyek manusia yang dididik atau materi pendidikan yang lebih signifikan?, sampai mempertanyakan bagaimana mengelola pendidikan.

Dalam kontek pendidikan, model pemikiran tersebut sangat strategis. Kekeliruan pola pikir tentang pendidikan akan mengakibatkan kefatalan atas

---

Drs. Wahyudin, M.Ag adalah dosen pada Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu. Menyelesaikan pendidikan Magister Pemikiran Islam di UIN Bandung. Pemerhati masalah pendidikan Islam dan dinamika politik lokal.

urgensi, peran, fungsi pendidikan yang pada akhirnya menimbulkan kekeliruan atas sikap dan orientasi hidup. Bagaimanapun juga antara pendidikan, hidup dan kehidupan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Penulis mencoba memaparkan gagasan idealis-teoritis tentang pendidikan, kemudian dikomparasikan dengan proses pendidikan yang sedang berjalan dan berkembang pada tataran praksis di Indramayu secara deskriptif, dengan harapan dapat membantu menemukan kekurangan dan kekeliruan paradigma pendidikan di Indramayu secara jujur. Tulisan ini tidak ada tendensi politis, juga tidak menawarkan alternatif solusi praksis, akan tetapi bersama-sama menyadari segala kekeliruan yang ada dan kemudian memperbaikinya.

Kajian tulisan ini tidak bersifat praktis akan tetapi lebih kepada tataran idealis-teoritis yang masih perlu banyak diperdebatkan dan tidak bersifat kebenaran final.

## **B. Teorisasi Pendidikan Islam**

Berangkat dari pertanyaan apakah makna substansial pendidikan?, maka kajiannya berangkat dari terminologi pendidikan. Dalam konteks Islam dikenal tiga terminologi yang berkaitan dengan pendidikan; *Ta'lim*, *Tarbiyah* dan *Ta'dzib*. Dalam konteks *ta'lim*, maka substansi dari pendidikan adalah proses belajar dan mengajar yang orientasinya lebih kepada penggalan kemampuan rasional untuk mengembangkan potensi alam sebagai sarana pendukung keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia sehingga manusia dapat hidup mandiri- tidak menggantungkan pada orang lain, tidak merepotkan orang lain, bahkan tidak mengganggu kehidupan orang lain. Maka apabila terjadi interaksi proses belajar dan mengajar yang output dan outcame nya memasung rasionalisasi - menimbulkan manusia yang suka menggantungkan diri, merepotkan orang lain, bahkan mudlarat bagi orang lain, itu artinya pelaksanaan proses belajar dan mengajar telah menyimpang dari teorisasi pendidikan. Dalam pendidikan umum terminologi *Ta'lim* dirumuskan dalam ranah kognitif.

Dalam konteks *Tarbiyah*, akar katanya berasal dari Rabb, Yurabbi, tarbiyatan, artinya nilai-nilai ketuhanan. Maka Subtansi pendidikan bermakna proses menggali, menanamkan dan memancarkan nilai-nilai ketuhanan. Berbicara

nilai-nilai ketuhanan dalam Islam rumusannya ada dalam al Asma al Husna (sembilan puluh sembilan sifat Tuhan), Salah satu diantara dari asma al Husna adalah *Rahman* dan *Rahim*, artinya Tuhan Maha Pengasih yang tidak pernah minta/pamrih bahkan limpahannya didasarkan kepada rasa sayang bukan didasarkan kepada keterpaksaan, pamrih balasan, takut ancaman, malu atau didasarkan kepada kepentingan-kepentingan lainnya. Keterpurukan manusia salah satunya akibat memposisikan dirinya di atas Tuhan, ia memberi karena terpaksa, memiliki kepentingan bahkan sebagai alat menjatuhkan martabat kemanusiaan (agar manusia yang menerima bisa memberi yang lebih dari apa yang dikasih) dan akhirnya yang menerima juga dalam keadaan terhina, rendah nilai kemanusiaannya. Dalam teori pendidikan umum terminologi tarbiyah ini dirumuskan dalam ranah afektif.

Dalam konteks *Ta'dib*, terambil dari kata adab, bermakna nilai-nilai moralitas . Dalam konteks ini maka pendidikan harus dilakukan atas dasar moralitas yang kemudian berkembang dengan nilai-nilai akhlak. Rujukan pengembangan moral/akhlak dalam Islam mengacu kepada pernyataan bahwa “akhlak rasul adalah al Qur’an” dalam konteks agama lain bisa dimaknai, bahwa “akhlak yang baik adalah yang sesuai dengan kitab sucinya”. Oleh karenanya proses belajar mengajar yang sesungguhnya adalah menanamkan akhlak/moralitas/tingkah laku agar selaras dengan tuntunan kitab suci. Dengan nilai-nilai moralitas yang baik akan terwujudnya silaturahmi, komunikasi dan koordinasi yang pada akhirnya terwujudnya kehidupan yang penuh dengan kerjasama, saling membantu, aman, nyaman, tertib dan indah.

Dari teorisasi pendidikan menurut Islam tersebut di atas, maka substansi pendidikan adalah upaya meniscayakan out put dan outcome yang mengarahkan, manusia agar; Pertama. menghargai rasio dan hidup didasarkan kepada rasio; Kedua, mampu memancarkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan; Ketiga. memiliki nilai moralitas yang tinggi sesuai dengan tuntunan kitab sucinya.

Dengan tergalinya substansi pendidikan, maka pertanyaan filosofis di atas, nampak jelas dan gambalang jawabanya; yaitu Pendidikan merupakan kebutuhan manusia dan sebagai sarana mengolah akal, perasaan dan moralitas, harus dilakukan dengan kajian mata pelajaran yang menunjang, serta pengelolaan

pendidikan yang mengacu kepada nilai-nilai yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

### C. Realita Pendidikan di Indramayu

Program peningkatan IPM (Indek Pembangunan Manusia), yang meliputi Bidang Pendidikan, Kesehatan dan daya beli (ekonomi) merupakan program terpadu yang dicanangkan Pemerintah dari tingkat Pemerintah Propinsi sampai Pemerintah Kabupaten dan kota. Khususnya Pemerintah Kabupaten Indramayu, Program peningkatan IPM dimaksud, nampaknya digulirkan secara serius bahkan telah dicanangkan sebagai program prioritas di antara program-program pembangunan lainnya. Program peningkatan IPM menjadi indikator keberhasilan seorang pimpinan wilayah dan pimpinan lembaga. Akibatnya tidak sedikit yang terdegradasi jabatannya akibat tidak mampu mendongkrak nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Khususnya di bidang pendidikan, Kabupaten Indramayu telah mampu memperbaiki image yang dulu dikenal sebagai daerah terbelakang dalam pendidikan dan maju dalam komoditi wanita asusila. Nampaknya dalam lima tahun belakang, bidang pendidikan Kabupaten Indramayu menduduki rangking papan atas di tingkat Propinsi Jawa Barat, bahkan perolehan hasil Ujian Nasional tahun pelajaran 2006/2007 berhasil menduduki peringkat dua besar untuk tingkat SLTA dan lima besar untuk tingkat SLTP (SMP/Mts).

Prestasi menggembirakan tersebut ternyata menjadi polemik diantara orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan, bahkan masuk ranah politik antar fraksi di DPRD Kabupaten Indramayu. Nampaknya polemik ini berangkat dari pertanyaan, substansialkah perolehan ranking tersebut?. Jawaban pertanyaan ini harus jujur dan sesuai dengan fakta dan realita di lapangan. Untuk itu, paling tidak ada beberapa indikator untuk mengukur seberapa substansialnya perolehan rangking pendidikan yang diperoleh Indramayu;

1. Kebijakan Pemerintah tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun dan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun dengan menyediakan anggaran baik dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten

yang dikenal dengan “BAKTI dan BAGUS” dulu KBBS 1 dan KBBS 2.

Kebijakan Pemerintah terhadap Wajar Dikdas 9 tahun dan Wajar 12 tahun merupakan keseriusan pemerintah terhadap nasib rakyatnya agar mengenyam pendidikan. Namun pada tataran praktis dirasakan kebijakan ini hanya kebijakan populis dan tidak didasarkan kepada landasan filosofis, akibatnya sekolah berhadapan dengan tuntutan kebijakan Pemerintah pada satu sisi, dan di sisi yang lainnya berhadapan dengan kultur dan budaya masyarakat.

Secara filosofis, bahwa manusia memiliki potensi berbeda, karena lahir dari keluarga yang berbeda dan hidup di lingkungan masyarakat yang berbeda. Oleh karenanya realita penerapan kebijakan harus mengacu kepada kerangka filosofis potensi perbedaan manusia.

Pada saat kita mewajibkan anak yang sudah lama putus sekolah dan sudah lama bergelut dengan pekerjaan, tiba-tiba diwajibkan masuk kembali ke sekolah, maka yang diperoleh adalah; (1). siswa minder karena sudah memiliki usia lebih dibanding kawannya, (2). Merasa tertekan oleh pelajaran karena sudah lama tidak berpikir pelajaran, (3). Orang tua merasa kehilangan pendapatan karena anaknya meninggalkan pekerjaan, (4). Sekolah berhadapan dengan siswa yang memiliki mental/jiwa kerja bukan jiwa belajar.

Agar kebijakan wajib belajar efektif dan efisien maka harus selektif terhadap penjarangan calon siswa yang berasal dari siswa putus sekolah, karena jika itu akan menjadi problem bagi pemerintah, anak, orang tua dan sekolah. Bagi Aparat pemerintahan di tingkat bawah, seperti tingkat Kecamatan maupun Desa, demi mempertahankan loyalitasnya terhadap Pemerintahan di atasnya dan demi ketahanan jabatannya, maka melakukan upaya pendataan yang tidak akurat. Akibat dari itu semua maka anggaran yang tersedia habis mubadzir.

## 2. Kebijakan Pemberian Tunjangan Daerah Bagi Guru.

Kebijakan ini merupakan angin segar bagi guru karena sedikitnya mendapatkan penghasilan tambahan, yang selama ini nasib guru tidak

memperoleh penghasilan yang layak. Paling tidak kebijakan ini akan meningkatkan semangat dan kinerja guru. Namun pada tataran realitas karena kebijakan ini sangat dikotomis, dikatakan dikotomis karena kebijakan ini hanya mengikat pada guru yang berada dalam wilayah otonomi Daerah, sedangkan guru yang berada pada tanggung jawab Pemerintah Pusat tidak memperoleh tunjangan dimaksud, padahal keduanya sama manusia yang memiliki potensi kemanusiaan yang sama, hidup di bumi Indranayu yang sama, berbakti bagi masyarakat Indramayu, dan memiliki tuntutan dan tanggung jawab yang sama. Akibatnya tujuan peningkatan kinerja guru dijawab dengan kecemburuan.

3. Pemberian reward terhadap lembaga yang mampu meluluskan 100% siswanya;

Ketentuan Ujian Nasional sebagai penentuan kelulusan dengan nilai kompetensi lulusan yang tinggi dan dilakukan dengan ketat, maka pemerintah daerah mensiasatinya dengan penawaran reward bagi lembaga yang mampu meluluskan siswanya 100 %. Andaikan reward ini di aplikasikan atas landasan filosofis, baik yang memberi maupun yang menerima maka hasilnya sangat efektif. Namun bila kebijakan ini di berikan sebagai tekanan baik mental maupun moral dan reward dimaknai sebagai "tujuan akhir" maka yang terjadi, adalah timbulnya ketidak nyamanan dalam mengelola pendidikan bahkan hanya diorientasikan agar bagaimana lembaga dimaksud mendapatkan reward. Celaknya lagi reward hanya diberikan kepada lembaga yang berada dalam wilayah Otonomi Daerah, selain itu tidak tersentuh, sebut saja Mts dan MA sebagai lembaga pendidikan yang berada dalam wilayah Pemerintah Pusat.

4. Kebijakan Pemenuhan Sarana Sekolah (Pembangunan ruang kelas baru).

Untuk mendongkrak Indek Pembangunan Manusia (IPM) dalam bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Indramayu mencanangkan pembangunan gedung sekolah baru (RKB), bahkan mencanangkan dan merumusan model pendidikan unggulan. Pada tataran realita, rumusan

pendidikan unggulan akan mengesankan sekolah yang lain tidak memiliki keunggulan, kalau ini terjadi maka terjadi pembentukan watak sekolah yang arogansi karena dirinya merasa unggul dan yang lain dibawahnya, akibatnya sekolah bisa bertindak sesuai dengan keinginannya; mahal harganya, karena menjadi obsesi masyarakat yang menginginkan anaknya masuk kategori unggul.

Alternatifnya untuk memberikan identitas sekolah tanpa menimbulkan kesan watak arogansi adalah dengan merumuskan sekolah yang memiliki kompetensi bukan dihargakan dengan unggul dan tidak unggul akan tetapi menonjolkan ciri khas dari masing-masing sekolah; seperti sekolah wawasan seni, sekolah wawasan budaya, sekolah wawasan olahraga dan beladiri, sekolah wawasan teknologi, sekolah wawasan bahasa, sekolah wawasan sejarah, Identitas-identitas tersebut akan memacu sekolah untuk memiliki kemampuan pendalaman wawasan, sementara calon siswa akan secara demokrasi bisa memilih sesuai dengan bakat pengembangan wawasan dirinya.

Terhadap sarana pendidikan (gedung sekolah) apabila perhitungannya didasarkan pada gedung yang ada baik gedung milik pemerintah maupun gedung yang di bangun masyarakat (Yayasan/swasta) dengan jumlah anak yang mau sekolah nampaknya tidak mengalami kurang jumlah RKB, yang ada hanya optimalisasi gedung dimaksud. Apabila kebijakan pembangunan gedung baru dilakukan tidak mengacu kepada perhitungan yang akurat, maka yang timbul adalah banyak sekolah yang ada kekurangan siswa, bahkan sekolah senior yang memiliki umur yang tua tergusur oleh kehadiran lembaga yang dibangun baru. Andaikan kondisi ini dibiarkan berjalan maka yang timbul adalah persaingan rekrutmen siswa yang tidak sehat. Kalau terjadi persaingan yang tidak sehat maka sekolah yang dekat dengan pemerintah daerah (sekolah yang berada di wilayah otonomi daerah) akan mampu bertahan karena di back up dan didukung kekuasaan, sementara sekolah yang tidak di bawah naungan otonomi daerah akan lemah dengan sendirinya dan ditinggalkan masyarakat, walaupun ada yang mampu bertahan itu bersifat kasuistik karena basis masyarakat yang masih

fanatis keagamaan dan karena kuatnya modal sosialisasi. Indikasi yang terjadi dilapangan akibat dari persaingan yang tidak sehat dan ini masih memerlukan penelitian yang lebih akurat, adalah :

1. Terjadi penggalangan kuat agar calon siswa masuk semua di lembaga pendidikan Otonomi Daerah (SMP dan SMU), apabila terjadi sebaliknya maka status jabatan kepala terancam;
2. Di salah satu daerah, terjadi sosialisasi yang menyesatkan, bahwa lulusan Madrasah di kategorikan sekolah yang tidak laku dipasaran, kelanjutannya tidak bisa diterima di SMK.

Dari refleksi di atas kalau betul terjadi, menggambarkan bahwa masa depan pendidikan di Kabupaten Indramayu, baru mampu meningkat secara formalitas yang hanya menguntungkan secara politis dan tidak berhasil menyentuh substansial karena tidak berangkat dari pemikiran filosofis. *Wa allah al 'Alam bi al Shawwab.*